

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang dipandang relevan. Pentingnya penelitian terdahulu ditampilkan bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti. Berikut ini disajikan dua penelitian terdahulu yang dipandang relevan.

Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Karbulah, et,al(2018) dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. Fokus penelitiannya adalah program pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani untuk kesejahteraan masyarakattani, mengetahui bagaimana langkah-langkah pelaksanaan program pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani serta hasil program pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani. Teori yang digunakan adalah peranan, pemerintah dan empowerment. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama program yang dilakukan oleh pemerintah desa, ditandai oleh adanya program pemberian bibit pepaya California yang diserahkan langsung oleh kepala desa kepada setiap kadus, dan penyuluhan petani padi. Kedua, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi rebug warga, mengadakan kerja sama dengandinas pertanian, serta membentuk kelompok-kelompok tani untuk mengefektipkan program pemberdayaan, Ketiga,

hasil yang diperoleh dari pemberdayaan masyarakat tani diantaranya dibidang pertanian, ekonomi, pengetahuan dan lingkungan. Dibidang pertanian kurang lebih 60% masyarakat telah merasakan dampak dari program pemberdayaan masyarakat tani. keberhasilan dalam pemberian bibit pepaya, keberhasilan dalam mengadakan kerjasama dengan dinas, keberhasilan dalam melaksanakan penyuluhan dan keberhasilan dalam membentuk kelompok-kelompok tani.

Dalam jurnal penelitian Karbulah dkk (2018) dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Karbulah, et al (2018) dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. Adapun perbedaan penelitian dilakukan oleh Karbulah et al. (2018) dengan penulis adalah, pertama-tama Karbulah et al. (2018) berkonsentrasi pada Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Desa Mekarjaya Kecamatan Cidolog sedangkan peneliti memfokuskan pada Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Poktan) Di Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya, variabel yang digunakan Karbulah et al. (2018) adalah Program Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani, Langkah-Langkah dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Hasilnya. sedangkan penulis dengan menggunakan variabel kemudahan dalam akses permodalan, bantuan pembangunan sarana prasarana, dan Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha.

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Andi Nubu & Muhammad Mattalitti (2021) dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan

Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Fokus penelitiannya adalah peran strategis pemerintah desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam program pemberdayaan. Teori yang digunakan adalah sebagai berikut: Peran Pemerintah dan Pemberdayaan Komunitas Metode ini digunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan memberikan dampak terhadap keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa, ekonomi dan pertanian. Peran tersebut meliputi peran antar pribadi, peran informasi dan peran pengambilan keputusan. Dari ketiga peran tersebut, belum semua berjalan optimal, yakni peran informasi dan pemberdayaan dibidang ekonomi, khususnya usaha mikro, dimana pemerintah desa belum memberikan perhatian kepada usaha ini, kendala utamanya dikarenakan usaha tersebut tidak terdaftar di kantor Desa dan belum berjalan konsisten sehingga pemerintah belum bisa memberikan dukungan.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Andi Nubu & Muhammad Mattalitti(2021)dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nubu & Muhammad Mattalitti(2021) dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Andi Nubu & Muhammad Mattalitti(2021) dengan penulis adalah, pertama Andi Nubu & Muhammad Mattalitti(2021) memfokuskan penelitian pada peran strategis pemerintah desa Lanowulu Kecamatan Tinanggea Kabupaten

Konawe Selatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam program pemberdayaan. Kedua, Variabel yang digunakan oleh Andi Nubu & Muhammad Mattalitti(2021) adalah peranan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat sedangkan penulis menggunakan variabel kemudahan dalam akses permodalan, bantuan pembangunan sarana prasarana, dan Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Tugas Dan Fungsi Pemerintah

Filosofi dibentuknya suatu pemerintahan adalah dalam rangka agar terciptanya keamanan, masyarakat mudah untuk beraktivitas. Rasyid dalam Baharuddin Tahir(2019, p. 95)mengatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat dapat menjalani hidupnya secara wajar. Dengan demikian adanya suatu pemerintahan karena adanya komitmen antara pemerintah dengan yang diperintah. Komitmen itu hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasakan bahwa pemerintahan itu memang diperlukan untuk melindungi,memperdayakan dan melayani rakyat,serta kesepakatan menjalankan instrumen hukum yang telah disepakati pemerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya Rasyid dalam Baharuddin Tahir(2019, p. 96) menguraikan tugas pemerintahan. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

- a. Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial : membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anakanak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
- f. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

- g. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan”

Lebih lanjut Rasyid dalam Mujian(2017, p. 37) menyatakan bahwa, tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi dapat diartikan bahwa pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Pendapat diatas hingga saat ini masih dijadikan suatu formulasi definisi tentang tugas dan fungsi pemerintah yang paling dipakai oleh para sarjana-sarjana dan para akademisi Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia.

Menurut Taliziduhu Ndraha dalam Devi Putra Hasnedi(2017, p. 15) ,fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

- a. Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- b. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

2.2.2 Pemberdayaan

2.2.3 Pengertian Pemberdayaan

Emoverment yang dalam bahasa Indonesia berarti penguatan merupakan suatu gagasan yang dibawa ke dunia sebagai salah satu ciri peningkatan kepribadian budaya dan budaya barat, khususnya Eropa. Ide penguatan mulai muncul sekitar tahun 70an, dan kemudian terus berkembang sepanjang tahun 80an hingga saat ini. Penguatan atau penguatan merupakan suatu gagasan yang penekanannya pada persoalan kekuasaan (power). Penguatan, apa pun dugaannya, adalah menoleransi kekuasaan sebagai suatu variabel, dan menjadikan orang yang tidak berkuasa mempunyai kekuasaan, atau paling tidak, orang yang lemah diberi kekuasaan melalui penguatan sehingga menjadi kuat. (Lasiman Sugiri, 2019 hal. 57)

Menurut Sumarjo dalam Kiki Endah (2020,p. 137) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Menurut Ife dalam Dwi Iriani Margayaningsih(2018, p. 78) Penguatan adalah pemberian aset, pintu terbuka, informasi dan kemampuan kepada daerah setempat untuk memperluas kemampuan daerah setempat dalam menentukan masa depan mereka, serta mengambil bagian dan memberi dampak pada kehidupan lokal itu sendiri.

Pemberdayaan menurut Adams dalam Ulfi Putra Sany (2019,p. 34) berarti cara dan metode yang digunakan individu, kelompok dan atau komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka.

Dari beberapa pengertian pemberdayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pemberian daya (*power*) berupa kesempatan atau peluang pengetahuan, keahlian, dan materi, sehingga membuat yang tidak berdaya (*powerless*) menjadi memiliki kekuasaan (*powerfull*) atau membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan rasa percaya diri klien (masyarakat) sehingga mereka mempunyai Daya/kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dalam rangka mencapai Kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menentukan masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

2.2.4 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani dalam Nekky Rahmiyati,et,al(2015,p. 53) menjelaskan bahwa tujuan dicapai ingin yang dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir,tersebut bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu mencapai tepat demi dipandang yang

pemecahan masalah yang dihadapi dengan yang mempergunakan daya/kemampuan dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lain nya yang bersifat fisik-material. (Suryana, 2019, p. 5)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan tujuan pemberdayaan untuk mewujudkan membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat meliputi kelembagaan

pertanian,perbaikan perbaikan kehidupan masyarakat dan perbaikan usaha dan lingkungan hidup.

2.2.5 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi . Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.(Garda Try Ananda, 2019, p. 18)

Wilson dalam Garda Try Ananda(2019, p. 22) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;
- 2) Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

- 3) Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;
- 4) Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;
- 5) Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;
- 6) Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;
- 7) Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru

Totok Mardikanto dan Soebiato dalam Tri Handayani(2017, pp. 22–24) mengemukakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan, antara lain:

1. Tahapan pertama seleksi lokasi.

Seleksi wilayah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh lembaga pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan lokasi sangat penting agar pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Seleksi lokasi untuk menentukan lokasi masyarakat miskin yang benar-benar harus diberdayakan.

2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat.

Melalui proses sosialisasi akan membantu menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.

1. Proses pemberdayaan masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menungkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut ini :

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses tersebut meliputi:
 - a) Persiapan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya
 - b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan
 - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan
 - d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi:
 - a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
 - b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - d) Pengembangan rencana kegiatan serta perorganisasian pelaksanaan

- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan
- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring dan evaluation/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. PME adalah proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaannya) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan

4. Pemandirian masyarakat

Arah kemandirian masyarakat berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya karena prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh satu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran

tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

2.2.6 Strategi Pemberdayaan

Dalam menjalankan tugas pemerintah menurut Suharto dalam Ikbal Herdiansyah(2019, pp. 15–17) memiliki empat bidang tugas atau fungsi pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat, empat bidang tersebut terdapat dalam akronim 4P, yaitu:

3. Pemungkinan atau Fasilitasi (*Enabling*)

Tugas dan fungsi ini dijalankan oleh pemerintah dalam rangka membangun motivasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat. Fungsi ini sangat penting karena dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat menjadi subjek yang harus memiliki motivasi yang tinggi dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Contoh : mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama dan manajemen sumberdaya.

4. Penguatan (*Empowering*)

Fungsi ini merupakan fungsi yang menjalankan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat di lingkungannya (*capacity building*). Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi serta menyelenggarakan pelatihan adalah tugas atau fungsi penguatan.

5. Perlindungan (*Protecting*)

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang dijalankan pemerintah dalam kaitannya dengan interaksi kelembagaan yang dibangun untuk memberikan sarana pembelaan melalui media-media untuk meningkatkan hubungan dan jaringan kerja masyarakat.

6. Pendukungan (*Supporting*)

Fungsi ini mewajibkan pemerintah untuk turut serta dalam segala sesuatu yang bersifat aplikatif, pemerintah harus ikut melaksanakan tugas-tugas teknis yang telah dirumuskan bersama dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki sebagai seperti analisis sosial, manajemen konflik, membangun relasi, negosiasi, komunikasi dan mengatur sumber dana.

Menurut Suharto proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: (Rauf A. Hatu, p 241)

1. Pemungkinan, menciptakan susana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlintas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyongkongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (Rauf A. Hatu, p 241)

Secara garis besar ada beberapa upaya pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Freeman Stoner & Gilbert(1998, pp. 126–128)dapat dilakukan sebagai berikut :

1.) Kemudahan dalam Akses Permodalan;

- a) Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha home industry, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha home industry. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* yakni pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Yang perlu dicermati dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor home industry melalui aspek permodalan ini adalah: Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan.
- b) Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja home industry. Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan

usahah yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan.

- c) Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

2.) Bantuan Pembangunan Prasarana;

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil pemasarannya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah.

3.) Pengembangan Skala Usaha

Strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

4.) Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha;

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun

pengembangan kluster. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi *home industry* untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya melakukan kerja sama dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis *home industry*.

5.) Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan program pelatihan bagi masyarakat pemilik *home industry* baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, *on the job training*, pemagangan dan kerja sama usaha.

2.2.7 Kerangka Konseptual

Bagan 2.1
Kerangka Konseptual

